

BAB III

GAMBARAN WILAYAH STUDI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran wilayah studi yang terdiri dari gambaran umum dan gambaran obyek penelitian.

3.1 Gambaran Umum Indonesia

3.1.1 Kondisi Geografis Indonesia

Secara astronomis, Indonesia terletak antara $6^{\circ} 04' 30''$ Lintang Utara dan $11^{\circ} 00' 36''$ Lintang Selatan dan antara $94^{\circ} 58' 21''$ sampai dengan $141^{\circ} 01' 10''$ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0° . Sedangkan secara posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas, sebagai berikut: (seperti yang tertera pada Gambar 3.1)

1. Sebelah utara berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini dan Samudera Pasifik.

Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, wilayah Indonesia terbagi menjadi 2 kawasan pembangunan, yaitu:

1. Kawasan Barat Indonesia terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
2. Kawasan Timur Indonesia terdiri dari Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan terhubung oleh berbagai selat dan laut. Pada tahun 2020, total jumlah pulau di Indonesia sebanyak 16.771. Indonesia memiliki luas daerah sebesar 1.916.906,77 km² yang terdiri dari 83.820 desa, 7.252 kecamatan, 416 kabupaten dan 98 kota, yang terdapat pada 34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan, seperti yang tertera pada Tabel III.1.



Sumber: Hasil Olahan ArcGIS, 2020

GAMBAR 3.1
PETA INDONESIA

3.1.2 Kondisi Demografi Indonesia

Berdasarkan data yang bersumber dari dokumen Statistik Indonesia 2020, bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 268.074,8 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2019 yaitu sebesar 1,31% (persen) per tahun, juga dengan kepadatan penduduk 140 jiwa/km² yang tersebar pada 34 provinsi, seperti pada Tabel III.1 berikut.

TABEL III. 1
DATA GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI MENURUT PROVINSI DI
INDONESIA, 2019

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
Pulau Sumatera					
1	Aceh	5.371,50	57.956,00	1,93	93
2	Sumatera Utara	14.562,50	72.981,23	1,24	200
3	Sumatera Barat	5.441,20	42.012,89	1,25	130
4	Riau	6.971,70	87.023,66	2,52	80
5	Jambi	3.624,60	50.058,16	1,72	72
6	Sumatera Selatan	8.470,70	91.592,43	1,39	92
7	Bengkulu	1.991,80	19.919,33	1,63	100
8	Lampung	8.447,70	34.623,80	1,13	244
Kepulauan Bangka Belitung					
9	Kep. Bangka Belitung	1.488,80	16.424,06	2,14	91
Kepulauan Riau					
10	Kepulauan Riau	2.189,70	8.201,72	2,90	267
Pulau Jawa					
11	DKI Jakarta	10.557,80	664,01	1,02	15.900

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
12	Jawa Barat	49.316,70	35.377,76	1,48	1.394
13	Jawa Tengah	34.718,20	32.800,69	0,76	1.058
14	DI Yogyakarta	3.842,90	3.133,15	1,15	1.227
15	Jawa Timur	39.698,60	47.799,75	0,62	831
16	Banten	12.927,30	9.662,92	2,14	1.338
Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil)					
17	Bali	4.336,90	5.780,06	1,17	750
18	Nusa Tenggara Barat	5.070,40	18.572,32	1,29	273
19	Nusa Tenggara Timur	5.456,20	48.718,10	1,66	112
Pulau Kalimantan					
20	Kalimantan Barat	5.069,10	147.307,00	1,56	34
21	Kalimantan Tengah	2.714,90	153.564,50	2,26	18
22	Kalimantan Selatan	4.244,10	38.744,23	1,71	110
23	Kalimantan Timur	3.721,40	129.066,64	2,24	29
24	Kalimantan Utara	742,2	757.467,70	3,84	10
Pulau Sulawesi					
25	Sulawesi Utara	2.507,00	13.851,64	1,07	181
26	Sulawesi Tengah	3.054,00	61.841,29	1,61	49
27	Sulawesi	8.851,20	46.717,48	1,05	189

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
	Selatan				
28	Sulawesi Tenggara	2.704,70	38.067,70	2,10	71
29	Gorontalo	1.202,60	11.257,07	1,58	107
30	Sulawesi Barat	1.380,30	16.787,18	1,91	82
Kepulauan Maluku					
31	Maluku	1.802,90	46.914,03	1,75	38
32	Maluku Utara	1.255,80	31.982,50	2,08	39
Pulau Papua					
33	Papua Barat	959,6	102.955,15	2,55	9
34	Papua	3.379,30	31.903,05	1,88	11
INDONESIA		268.074,6	1.916.906,77	1,31	140

Sumber: Statistik Indonesia, 2020

3.1.3 Kondisi Perekonomian Indonesia

Menurut BPS, Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB menurut lapangan usaha terdiri dari 17 lapangan usaha yang dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik Dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi Dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

TABEL III. 2
PDRB INDONESIA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2012 -
2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
	Milliar rupiah				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.555.207,0	1.671.597,8	1.787.963,6	1.900.803,6	2.013.626,9
Pertambangan dan Penggalian	881.694,1	890.868,3	1.029.554,6	1.198.987,1	1.149.913,5
Industri Pengolahan	2.418.891,7	2.545.203,6	2.739.711,9	2.947.450,8	3.119.617,3
Pengadaan Listrik dan Gas	129.833,7	142.344,4	162.339,8	176.640,3	185.115,3
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8.546,3	8.909,4	9.438,6	10.024,2	10.736,3
Konstruksi	1.177.084,1	1.287.600,8	1.410.513,6	1.562.297,0	1.701.741,2
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.532.876,7	1.635.410,4	1.768.865,2	1.913.818,7	2.060.772,6
Transportasi dan Pergudangan	578.464,3	644.993,9	735.229,6	797.846,9	881.662,6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	341.555,8	363.055,5	387.031,1	412.709,7	440.267,7
Informasi dan Komunikasi	406.016,5	449.188,7	513.715,9	558.938,0	626.424,7
Jasa Keuangan dan Asuransi	464.399,9	520.206,8	571.203,6	616.315,1	671.356,0
Real Estat	327.601,4	350.488,2	382.259,2	406.013,7	439.367,1
Jasa Perusahaan	190.267,9	211.623,6	238.217,0	267.094,0	304.285,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	449.382,4	476.490,9	499.343,6	542.028,7	572.456,9
Jasa Pendidikan	387.611,4	417.344,8	447.137,6	481.724,3	522.745,5
Jasa Kesehatan dan	123.191,5	132.100,5	144.830,7	158.063,6	174.801,7

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
	Milliar rupiah				
Kegiatan Sosial					
Jasa Lainnya	190.581,0	211.427,9	239.258,6	268.625,8	308.839,6

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia, 2020

Berdasarkan Tabel III.2 menunjukkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Indonesia pada tahun 2015 – 2019 sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi paling besar yaitu sebesar 3.119.617,3 miliar pada tahun 2019 atau sebesar 19,70% (persen), sedangkan sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang memiliki kontribusi paling kecil yaitu sebesar 10.736,3 miliar pada tahun 2019 atau sebesar 0,07% (persen). Pada sektor Informasi dan Komunikasi memiliki kontribusi sebesar 626.424,7 miliar pada tahun 2019 atau sebesar 3,96% (persen).

3.2 Gambaran Umum Obyek Penelitian

3.2.1 Perkembangan Teknologi Infrastruktur dan Komunikasi Indonesia

Perkembangan TIK Indonesia apabila dibandingkan negara-negara lain mengalami peningkatan. Berdasarkan ITU (*International Telecommunication Union*), *Measuring Information Society 2017* dalam BPS menjelaskan bahwa Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-114 dari 175 negara, sedangkan pada tahun 2016 Indonesia menduduki peringkat ke-111 dari 176 negara. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, posisi Indonesia berada di atas Kamboja, Timor Leste, dan Myanmar. Sedangkan negara yang berada pada peringkat lima besar IP-TIK 2015 dan 2016 adalah Islandia, Korea Selatan, Swiss, Denmark, dan Inggris. Apabila dilihat berdasarkan subindeks penyusun IP-TIK, yaitu pada subindeks akses dan infrastruktur, Indonesia berada pada peringkat ke-105 di tahun 2016, yang mana mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang mana berada pada peringkat ke-108. Adapun negara dengan nilai subindeks akses dan infrastruktur tertinggi adalah Luxembourg. Lalu, pada subindeks penggunaan, Indonesia berada pada peringkat ke-115 di tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Adapun negara dengan subindeks penggunaan tertinggi di tahun 2016 adalah Denmark. Terakhir, pada subindeks keahlian, Indonesia berada pada peringkat ke-110 di tahun 2015 dan mengalami peningkatan menjadi peringkat ke-109 di tahun 2016.

Selain itu, dilihat dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh NRI, 2020 atau *Network Readiness Index* adalah Indeks Kesiapan Teknologi, dengan 4 faktor pertimbangan: Teknologi (*Technology*), SDM (*People*), Pemerintahan (*Government*), dan Dampak (*Impact*). Indonesia berada pada peringkat ke-73 dari 134 negara. Berdasarkan 4 faktor pertimbangan yang dilakukan, pada faktor Teknologi berada di peringkat ke-72, pada faktor SDM berada di peringkat ke-79, pada faktor Pemerintahan berada di peringkat ke-68, dan pada faktor Dampak berada di peringkat ke-72 dari 143 negara. Selain itu menurut IMD, 2019 atau *IMD World Digital Competitiveness Ranking*, Indonesia berada pada peringkat ke-56 dari 63 negara. *IMD World Digital Competitiveness* merupakan sebuah data yang memuat hasil pengukuran kapasitas dan kesiapan dari 63 negara dalam mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi dan sosial. Terdapat 3 faktor yang menjadi parameter, yaitu pengetahuan (*knowledge*), teknologi (*technology*), dan kesiapan masa depan (*future readiness*).

Perkembangan TIK di Indonesia terlihat memiliki kecenderungan yang positif atau mengalami peningkatan. Berdasarkan BPS, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, IP-TIK Indonesia sebesar 5,07 menjadi 5,32 pada tahun 2019, yang mana mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen. Kenaikan nilai tersebut juga terjadi pada ketiga subindeks penyusunnya, yaitu subindeks akses dan infrastruktur, subindeks penggunaan, dan subindeks keahlian. Pada subindeks akses dan infrastruktur mengalami pertumbuhan sebesar 3,56 persen, dari nilai 5,34 pada tahun 2018 menjadi 5,53 pada tahun 2019. Pada subindeks penggunaan mengalami pertumbuhan sebesar 8,99 persen, dari nilai 4,45 pada tahun 2018 menjadi 4,85

pada tahun 2019. Pada subindeks keahlian mengalami pertumbuhan sebesar 1,31 persen, dari nilai 5,76 pada tahun 2018 menjadi 5,32 pada tahun 2019.

3.2.2 Program dan Kegiatan dalam Pembangunan TIK

Saat ini pembangunan infrastruktur TIK masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan TIK Indonesia. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut, maka diperlukan adanya beberapa program pembangunan infrastruktur TIK yang terarah. Selama pada tahun 2015-2019, Kemenkominfo telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan guna mendorong peningkatan sebaran infrastruktur TIK di seluruh wilayah di Indonesia. Berikut adalah beberapa program dan kegiatan pembangunan infrastruktur TIK, yaitu:

a. *Universal Service Obligation (USO)*

Program USO atau kewajiban kontribusi pelayanan universal telekomunikasi merupakan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil, perintisan, atau daerah perbatasan. Sumber pendanaan pokok berasal dari kontribusi 0,75% dari annual gross revenue seluruh penyelenggara telekomunikasi.

b. Program Palapa Ring

Program Palapa Ring merupakan proyek strategis nasional untuk membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional di wilayah non komersial atau 3T, yang terintegrasi membentang dari Sumatera Utara sampai Papua bagian barat yang panjangnya sekitar 25.000 km. Dengan adanya pembangunan jaringan optik Palapa Ring ini, diharapkan akses dan harga dari layanan internet cepat (*broadband*) akan semakin tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia dan akan membuka hambatan informasi (*information barrier*) di daerah Indonesia Timur yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Adapun program yang telah dilakukan sampai pada tahun 2019 yaitu menghubungkan jaringan backbone nasional ke 457 kabupaten/kota oleh operator Telkom dan pembangunan oleh KPBU selesai di 57 kabupaten/kota, sehingga total 514 kabupaten/kota telah tersedia jaringan backbone nasional.

c. *Fixed Broadband*

Fixed broadband merupakan internet kabel yang memanfaatkan jaringan fiber optik, biasanya terhubung ke perangkat melalui LAN atau Wi-Fi. Untuk mengetahui pada suatu wilayah telah terlayani jaringan fixed broadband bisa dengan melihat sebaran Optical Distribution Point (ODP). ODP merupakan titik distribusi akhir dari jaringan fixed broadband sebelum masuk ke rumah pelanggan dan dari data ODP tersebut dapat diketahui seberapa besar jangkauan jaringan fixed broadband di Indonesia. Pada tahun 2019, jangkauan jaringan fixed broadband hingga ke kecamatan sebanyak 35,71% atau sekitar 2.672 kecamatan yang terlayani dari total 7.175 kecamatan.

Dalam meningkatkan fixed broadband ini terdapat beberapa program yang dilakukan, seperti menyediakan bantuan layanan akses internet di wilayah non 3T sebagai langkah menciptakan multiplier effect penetrasi fixed broadband, yang difokuskan pembangunannya pada sentra UMKM, rumah produktif, dan homestay (sentra pariwisata).

d. *Program Mobile Broadband*

selama periode 2015-2019 Kemenkominfo mengadakan pembangunan dalam penyelenggara layanan telekomunikasi untuk memperluas layanan mobile broadband 4G LTE agar dapat diakses di seluruh wilayah di Indonesia. Namun, dalam pengembangannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu kondisi geografis wilayah (kepulauan dan pegunungan) yang mengakibatkan pemilihan teknologi jaringan menggunakan satelit yang biayanya cukup mahal. Selain itu juga dikarenakan kondisi sumber daya yang minim (pasokan listrik, akses jalan), kondisi keuangan operator seluler yang menunjukkan keuntungan/*revenue* yang kurang baik dan masih kurangnya regulasi pendukung dari pemerintah pusat maupun daerah.

e. *Program Base Transceiver Station*

Penyediaan infrastruktur BTS merupakan penyediaan layanan mobile broadband atau menara jaringan seluler di daerah yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler, khususnya di daerah-daerah non-komersial

dan 3T yang masih dalam keadaan tidak terlayani. Pada tahun 2019, kemenkominfo telah membangun BTS di 1.253 lokasi. Diharapkan dengan pembangunan BTS tersebut, dapat semakin banyak desa yang terjangkau oleh sinyal telekomunikasi sehingga banyak pula masyarakat di wilayah non-komersial dan 3T yang dapat menikmati konektivitas telepon seluler dan dapat mengakses informasi dengan lebih mudah.’

f. Akses Internet

Program akses internet ini disediakan khususnya pada lokasi titik layanan publik, seperti sekolah, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), balai latihan kerja, ruang publik, terminal, dan pos lintas batas negara. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan akan penggunaan TIK bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan pemberdayaan *e-literasi* masyarakat, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

g. Satelit Multifungsi

Satelit Multi Fungsi atau SMF bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas broadband Nasional. Proyek SMF telah direncanakan menurut Perpres nomer 96 tahun 2014 tentang Pita Lebar di Indonesia, RPJMN tahun 2015-2019 dan Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Hingga tahun 2019 progres SMF SATRIA telah dilakukan penandatanganan KPBU yang akan memulai dikonstruksi pada awal 2020 oleh manufaktur satelit asal Prancis Bernama Thales Alenia Space. SMF SATRIA adalah satelit pertama dan terbesar untuk kelas 100Gb. SMF Satria menggunakan teknologi High Throughput satellite yang lebih unggul dari teknologi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga bisa lebih cepat dan lebih maju dalam menggunakan teknologi baru.

h. Penataan Sumber Daya Frekuensi

Pengolahan sumber daya spektrum frekuensi radio selama periode 2015-2019, telah berhasil mengatur frekuensi secara optimal sehingga menghasilkan frekuensi radio untuk mobile broadband sebesar 546MHz.

pencapaian tersebut 56% lebih tinggi dari target yang tercantum pada Renstra Kemenkominfo tahun 2015-2019 sebesar 350Mhz. Dampak dari keberhasilan penataan spektrum frekuensi radio dapat dirasakan oleh masyarakat seperti jaringan LTE 4G yang lebih merata dengan kualitas yang baik. Pada Jaringan 4G di Indonesia pemerintah melakukan penataan ulang pada pita frekuensi radio yaitu 1800 MHz, 2.1 GHz dan 800/900 MHz dimana penataan tersebut bagian dari upaya memenuhi sasaran RPJMN 2015-2019 tentang pemanfaatan spektrum secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka. Untuk kedepannya pita low band untuk kebijakan pentik harus di ambil Indonesia adalah merilis spektrum 700 MHz untuk mendukung usaha operator dalam memperluas layanannya 10 tahun kedepan.

i. Penyelenggaraan Konektivitas Next Generation (5G)

Pada periode tahun 2017-2019 Kemenkominfo telah melaksanakan 10 kali ujicoba 5G mulai dari ujicoba indoor dan outdoor dengan melibatkan jaringan aktif secara end-to-end. Badan Litbang SDPPI Kemenkominfo telah melakukan 2 kali penelitian 5G untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan dari penyelenggara jaringan seluler dan telekomunikasi lainnya. Masukan yang di berikan antara lain perlunya regulasi pita frekuensi baru dan perlunya model lisensi baru, serta masukan time to market dari pemangku kepentingan seluler dalam menghindari market failure.

j. Penyiaran Televisi Digital

Dalam ekonomi digital perubahan televisi dari terrestrial ke digital merupakan suatu hal yang bernilai sangat strategis . Teknologi digital dapat menyampaikan siaran yang berkualitas dengan high definition, efisiensi infrastruktur pemancar dan digital dividend. Pada penggunaan digital dividend digunakan pada media internet dapat meningkatkan prekenomian serta menambahnya lapangan pekerjaan baru. Sejalan dengan proses perubahan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dalam program legiaslasi nasional. Penyelenggaraan diberikan oleh pada penyiaran public dan swasta yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kemenkominfo memberikan fasilitas kepada penyiaran public (TVRI) dalam pemoderenisasi pemancar, produksi dan kelengkapan lainnya untuk kelayakan penyiaran televisi hingga pada akhir tahun 2019 TVRI meningkatkan jangkauan televisi sampai 52% populasi Indonesia. Melalui peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no 3 tahun 2019 tentang pelaksanaan penyiaran simulcast telah di atur hal umum terkait pelaksanaan penyiaran, dan nomer 4 tentang persyaratan teknis alat atau perangkat telekomunikasi untuk penyiaran televisi dan radio, dan nomer 6 tentang rencana induk frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital pada pita frekuensi radio *Ultra High Frequency*.

k. Penyelenggaraan Pos

Dalam penyelenggaraan kegiatan layanan pos di Indonesia, sebuah badan usaha membutuhkan izin sebagai syarat untuk melakukan penyelenggaraan layanan di bidang pos. Berdasarkan database penyelenggaraan ps yang telah direkonsiliasi badan usaha dengan izin penyelenggaraan pos sebanyak 669 di seluruh wilayah Indonesia dan terpusat di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Hal ini menyebabkan kurangnya meratanya layanan pos di Indonesia, oleh karena itu pemerintah melalui Kemenkominfo mendorong pemerataan jangkauan layanan pos. pemerataan tersebut dengan melaksanakan Layanan Pos Universal pada daerah non komersial dan wilayah 3T serta Kawasan prioritas. LPU dilaksanakan oleh designated operator yang bertugas untuk membuka dan menyelenggarakan layanan khususnya layanan pos pada daerah daerah non-komersial dan wilayah 3T serta Kawasan prioritas